

DAFTAR PUSTAKA

- Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction. *Cogent Social Sciences*, 10(1), Hal.2
- Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Fukuda, Y., Pohan, Y. E., & Deguchi, T. (2011). Land subsidence of Jakarta (Indonesia) and its relation with urban development. *Natural Hazards*, 59(3), Hal.1753–1771.
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), Hal.1-19.
- Al-Hamid, S. A. S., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), Hal.741-766.
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), Hal.346-354.
- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Hal.10-18.
- Aufari, M. R. (2023). Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia*), Hal. 48–50.
- Belva, C. D. Q., & Raspati, B. (2024). Pengembangan Teknologi Dalam Memanfaatkan Eenergi Terbarukan Di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), Hal. 906-919.
- CahyaSupena, C. C. S. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia

Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372-388.

Danu Suryani, dkk. (2022). Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia,. *Jurnal Living Law*, Vol. 14, N, Hal. 119.

Herdiana, D. (2020). Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1). Hal. 3.

Ecky Agassi. (2013). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara." *Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*, Hal 1.

Ecky Agassi. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. (*Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*), (Universitas Merdeka Malang, Hal 25.

Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), Hal. 57–70.

Erwanti, F. L. P., & Waluyo, W. . (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan. *Sovereignty*, 1(1), Hal. 44-56.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia's Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective. *Jurnal Konstitusi*, Vomume 17,(2020), Hal. 532–533.

Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), Hal 21-22.

- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARASEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH(The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government). *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), Hal 1–19.
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), Hal 530–557.
- Hakam Bath, A. S. (2024). Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), Hal 129–144.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), Hal 183.
- Henry Black Campbell. (1968). Black's Law Dictionary, Fourth Edition, St. Paul, Minn. *West Publishing*, Hlm.262-263.
- Hindiawati, W. (n.d.). No Title. *PROBLEMATIK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Perspektif.*
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 19(2), Hal.108–128.
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Karimah Tauhid*, 3(6), Hal.6428–6444.
- Liam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), Hal.89–106.

- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1-19.
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), Hal.1–19.
- Megasari, I. D. (2016). Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(2), Hal.139–155.
- Haq, K. M. F., & Suhartono, S. (2024). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), Hal.772–779.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Muhtamar, S., & Rani Saputra, I. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), Hal.70–77.
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*, 7(2), 296-309.
- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislatif*, 5(2), Hal.79–90.
- Permatasari, Y., Chishans, R. M., & Jaya, D. T. (2022). Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), Hal.4828–4832.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), Hal.169–185.
- Rachmat Trijono. (2020). Menata Ius Constitutum Menuju Satu Sistem Hukum

- Nasional,. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol.6 No.*, Hal. 235-255.
- Rafsanjani, A. R. K. K. (2024). Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(10), Hal. 868–888.
- Rafsanjani, A. R. K. K. (2024). Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(10), Hal.868–888.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), Hal.12.
- Rusmana, R. T., & Illahi, B. K. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(2), Hal.171-187.
- Sari, P., & Maysarah, S. (2024). Foreign Direct Investment In Indonesia: Economic Growth IKN. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(2), Hal.503–518.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), Hal.173.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), Hal.131–137.
- Subandi, R. Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tegan Ibu Kota Negara. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(2), Hal.2.
- Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), Hal.43–56.

- Syafriadi, S. (2019). Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme. *UIR Law Review*, 3(2), Hal.22-33.
- Tasya, N. (2024). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(02), Hal.122-132.
- Jumantoro, T. R. P. (2024). Tinjauan Yuridis: Bentuk Pemerintahan dan Dampak Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), Hal. 4712-4722.
- Utari, A. A. A. S., & Astariyani, N. L. G. (2023). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan. *Sovereignty*, 2(2), Hal.170-187.
- Wiratmadinata, W. (2022). Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), Hal.42–43.
- Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), Hal. 21.

SUMBER BUKU

- Hayward, J. (2007). *Fragmented France: Two centuries of disputed identity*.
- Hardiman, F. B. (2019). *Demokrasi deliberatif*. PT Kanisius.
- Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M. ., Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M. S., & Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M. . (2023). *HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI*.
- C.F. Strong. (1963). *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick & Jackson,.
- Candra Perbawati, C. (n.d.). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.

Heywood, A. (2011). *Global Politic*.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. In *Jakarta: Konstitusi Press*,.

JimlyAsshiddiqie. (2021). *,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,.

Jurdi, F. (n.d.). *Hukum tata negara Indonesia. Kencana*.

Moh. Kusnardi, H. I. (1988). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*.

Montesquieu. (1748). *The Spirit of Laws*,.

Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.

Syahuri, D. T., & SH, M. (2011). *Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum*. Prenada Media.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*.

Möllers, C. (2013). *The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers*. Oxford University Press.

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Hukum & Teori Konstitusi*.

Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi. (1996). *hukum tata negara*.

SUMBER INTERNET

Hukumonline (2020) Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemerintahan DKI Jakarta. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pemerintahan-dki-jakarta-lt5ec1f2a2e095c/>, pada tanggal 18 Mei 2020.

Indonesia.id (2022) Pemerintahan Otorita dan Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara; Perspektif Hukum dan Konstitusi, Diambil dari <https://www.indonesiana.id/read/156323/pemerintahan-otorita-dan->

[implikasi-pemindahan-ibu-kota-negara-perspektif-hukum-dan-konstitusi](#),
pada tanggal 15 Juli 2022.

Law Justice (2022) Analisis Hukum Menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN).
Diambil dari <https://law-justice.co/artikel/129266/analisis-hukum-menggugat-uu-ibu-kota-negara-ikn/>, pada tanggal 14 April 2022.

Law Justice (2024) Soal Kelanjutan IKN, Prabowo Maju Kena Mundur Kena.
Diambil dari <https://www.law-justice.co/artikel/181758/pejabat-ikn-kembali-ada-yang-mundur-beneran-mangkrak/>, pada tanggal 12 Februari 2025.

Tempo.co (2022) 5 Polemik IKN, Mematok Tanah Warga Lokal hingga Potensi Pelanggaran HAM. Diambil dari <https://www.tempo.co/politik/5-polemik-ikn-mematok-tanah-warga-lokal-hingga-potensi-pelanggaran-ham-416380>, pada tanggal 16 Maret 2022.

Inilah.com (2023) Wajib Tahu! Ini Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara. Diambil dari <https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara>, pada tanggal 24 Maret 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undan-undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan daerah